

Mengenal

# MAHKAMAH KONSTITUSI

Teori, Gagasan, & Pembentukan Peradilan Konstitusi, Wewenang MK, *Constitutional Question*, Acuan Dasar MK



**Josef Mario Monteiro, S.H., S.I.P., M.H**

# **MENGENAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

Teori, Gagasan, & Pembentukan Peradilan Konstitusi,  
Wewenang MK, *Constitutional Question*, Acuan Dasar MK

JOSEF MARIO MONTEIRO., S.H., S.I.P., M.H

*Penerbit KBM Indonesia*

## *Penerbit KBM Indonesia*

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

# **MENGENAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

## **Teori, Gagasan, & Pembentukan Peradilan Konstitusi, Wewenang MK, Constitutional Question, Acuan Dasar MK**

*Copyright @2025 by Josef Mario Monteiro., S.H., S.I.P., M.H*

All rights reserved

**KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA**

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

**NO. IKAPI 279/JTI/2021**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

**081357517526 (Tlpn/WA)**

**Penulis**

Josef Mario Monteiro., S.H., S.I.P., M.H

**Desain Sampul**

Aswan Kreatif

**Tata Letak**

Ara Caraka

**Editor Naskah**

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

15 x 23 cm, vi + 145 halaman

Cetakan ke-1, Maret 2025

**ISBN 978-634-202-265-8**

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Website**

<https://penerbitkbm.com>

[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Instagram**

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

**Email**

naskah@penerbitkbm.com

**Distributor**

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

**Youtube**

Penerbit KBM Sastrabook

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

#### **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).





## KATA PENGANTAR

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu cabang kekuasaan yudikatif yang lahir di era reformasi. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan tugas konstitusional yang strategis kepada MK untuk turut serta menata sistem ketatanegaraan Indonesia. MK dibentuk oleh sejumlah gagasan teoretis dan dibekali kewenangan serta kewajiban konstitusional oleh Majelis Permusya-waratan Rakyat (MPR). Tentu tujuannya adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, tegaknya prinsip demokrasi, dan terwujudnya pemenuhan rasa keadilan. Bagi pencari keadilan, cara-cara berhukum bukan saja dicapai hanya melalui keadilan prosedural (formil), akan tetapi juga melalui cara-cara berhukum yang benar untuk meraih keadilan substansial (materiil). Oleh karena itu, bagi mahasiswa maupun masyarakat yang berminat mempelajari MK, perlu ada panduan yang menjelaskan keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Buku yang berjudul Mengenal Mahkamah Konstitusi ini, dimulai dengan menguraikan landasan teori sistem peradilan konstitusi yang dianut oleh negara-negara pada abad ke-21. Kekhasan dari peradilan konstitusi adalah pengujian produk hukum yang dikenal dengan *judicial review*. Secara khusus keberadaan peradilan konstitusi di negara RI tidak terlepas dari gagasan konseptual dari para ahli hukum tata negara. Untuk menambah wawasan, maka dipaparkan pula fungsi MK dari perspektif normatif dan praktik. Terkait dengan kewenangan MK mengawal dan menegakkan konstitusi, demokrasi, keadilan, dan hak-hak konsitusional warga negara. maka pembahasan kritis atas kewenangan MK dalam buku ini tetap dalam kerangka akademis yang substansif.

Mudah-mudahan buku ini sebagai salah satu rujukan yang berguna untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam lapangan Hukum Tata Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Namun, disadari adanya kekurangan dalam penyajiannya. Untuk itu, diharapkan masukan yang konstuktif bagi penyempuranaan buku ini. Selamat membaca.

Penulis



## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB 1 LANDASAN TEORI SISTEM PERADILAN KONSTITUSI.....</b> 1	
A. Prinsip Negara Hukum.....	1
B. Prinsip Kekuasaan Kehakiman.....	10
C. Pembentukan Hukum oleh Hakim .....	12
D. Penemuan Hukum oleh Hakim .....	16
<b>BAB 2 GAGASAN KONSEPTUAL PENTINGNYA PERADILAN KONSTITUSI .....</b> 21	
A. Doktrin Konstitutionalisme.....	21
B. Perlindungan Hak dan Kebebasan .....	24
C. Upaya Mewujudkan Pengawasan dan Tegaknya Konstitusi .....	28
<b>BAB 3 MEMBENTUKAN PERADILAN KONSTITUSI .....</b> 33	
A. Sejarah Pembentukan Peradilan Konstitusi di Negara Lain.....	33
B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....	36
C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	39

D. Fungsi Mahkamah Konsitusi .....	41
<b>BAB 4 PENGUJIAN KONSTITUTIONALITAS MK .....</b>	<b>47</b>
A. Hakikat Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang .....	47
B. Sejarah Perdebatan Pelembagaan Pengujian Konstitusionalitas di Indonesia .....	50
C. Konsep Pengujian Materiil dan Formil Undang-Undang .....	52
D. Perbandingan Pengujian Konstitusionalitas di Negara Lain .....	56
E. Undang-Undang (UU) sebagai Objek Pengujian Konstitusionalitas .....	59
<b>BAB 5 CONSTITUTIONAL QUESTION .....</b>	<b>71</b>
A. Istilah dan Pengertian .....	71
B. Constitutional Question di Negara Lain .....	72
C. Pelembagaan Constitutional Question di MK RI .....	77
<b>BAB 6 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI LAINNYA.....</b>	<b>81</b>
A. Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.....	81
B. Kewenangan MK Menyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....	86
C. Kewenangan MK Membubarkan Partai Politik .....	92
D. Kewenangan MK Memproses Hukum Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden .....	107
<b>BAB 7 ACUAN DASAR MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>127</b>
A. Pancasila .....	127

B. UUD 1945 .....	130
C. Doktrin Hukum.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>135</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>143</b>





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010
- \_\_\_\_\_, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2023
- \_\_\_\_\_, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2013
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta 2006

Atmadja, I Dewa Gde, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara* pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10 April 1996

---

Hukum Konstitusi  
Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, 2012

Agusman, Dumoli, Damos, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2014

Alrasid, H, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999

Appadorai, A, *The Substance of Politics*, Oxford University Press, New Dehli, 2005

Arizona, Yance, Endra Wijaya, dan Tanisius Sebastian, *Pancasila dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Epistema Institute dan TiFA, Jakarta, 2014

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, In Hill Co, Jakarta, 1992

---

, *Perbandingan Hukum Tata Negara (Dewan konstitusi di Prancis dan Mahkamah Konstitusi di Jerman)*, tanpa penerbit, Bandung, 1995

Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, cetakan ketiga, 1997

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977

---

, *Partisipasi dan Partai politik: Sebuah Bunga Rampai*, Gramedia, Jakarta, 1982

---

, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-22, Gramedia, Jakarta, 2001

- Bradley, A.W, and K.D.Ewing, *Constitutional and Administrative Law*, 13rd edition, Longman, Perason Education, 2003
- Chalid, Hamid, *Urgensi dan Upaya untuk Implementasi Mekanisme Constitutional Question melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam buku 60 Tahun Jimly Asshiddiqie Menurut Para Sahabat*. Ed . Nur Hidayat Sardini dan Gunawan Suswantoro, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2016
- Falaakh, Fahjrul Moh, *Bahaya Tirani DPR Konflik, DPR vs Presiden*, Lembaga Studi Politik Merdeka, Jakarta, 2001
- \_\_\_\_\_, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014
- Faiz, Mohamad, Pan, & M. Lutfi Chakim, *Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Hoessein, Arifin, Zainal, *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Husein, Wahyudin, HM & H. Hufron, *Hukum, Politik & Kepentingan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008
- Indrati, Farida, Maria, dkk, *Teori Perundang-Undangan*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015
- Indrayana, Denny, *Problem Konstitusi Pemberhentian Presiden*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 27 Agustus 2001
- Kamil, Ahmad, H, dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Cetakan Ke-3, Kencana, Jakarta, 2008

Kelsen, Hans, *General Theory of Law & State*, Russel & Russel, New York, 1973

\_\_\_\_\_, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cet. Pertama, Nusamedia & Nuansa: Bandung, 2006

Latif, Abdul, H, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Cetakan ke-2, Total Media, Yogyakarta, 2009

\_\_\_\_\_, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta, 2009

Legowo, TA, *Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi Khusus Tahun 2008, PSHK, Jakarta

Lotulung, Effendi, Paulus, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997/1998

Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013

Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Cetakan Ke-2, Rajawali Press, Jakarta, 2011

Molan, T, Michael, *Textbook of Constitutional Law: The Machinery of Government*, 4<sup>th</sup> edition, Old Bailey Press, Londodn, 2003

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009

Rasjidi, Lili, H, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, ditulisnya dalam buku *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof.B.Arief Sidharta*, Refika Aditma, Bandung

Raharjo, Satipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986

\_\_\_\_\_, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986

- Rinaldi, Kasmanto, *Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilihan Umum*, Tim Penulis Buku Hukum Pemilihan Umum Indonesia, Widina, Bandung, 2023
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Risalah Rapat ke-3 Komisi A tanggal 5 – 8 November 2001 Masa Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Buku Keempat Jilid 2A.
- Safa'at, Ali, M, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-2, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019
- H.M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, Konstitusi*
- Seidman, B, Robert, dan William J.Chambliss, dalam Esma Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Utama, Semarang, 2005
- Siahaan, Maruarar, *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi yang Hidup*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2008
- Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi ke-2, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Soemitro, Rochmat, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (disertasi), Eresco, Bandung, 1976
- Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Suherman, Manan, Ade, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Sweet, Stone, Alec, *The Politics of Constitutional Review in France and Europe*, International Journal of Constitutional Law, Vol.5, No.1 January 2007, Oxford University Press, Oxford

- Thalib, Rasyid, Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Teubner, Gunter *Dilemas of Law in the Welfare State*, Walter the Gruyter, New York, 1986
- Wahjono, Padmo, *Negara Republik Indonesia*, Edisi ke-2, Cetakan ke-3, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Wahyudi, Agus, dkk, (Ed.), *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2009
- Wibowo, Mardian, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019
- Yaqin, Ainul, Arief, *Constitutional Questional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

## **KAMUS**

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971

## **JURNAL**

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Unisia, No.51/XXVII/2004, UII, Yogyakarta

Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun ke-38 Juli 2008

## **MAJALAH**

Majalah Prisma Nomor 6 Tahun II, Desember 1973

Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIX No. 343 Juni 2014

## WEBSITE

*<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/l1t4fOaa8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum>*

*<http://equityjusticia.blogspot.co.id/2015/02/pengujian-konstitusional-diaustria.html>*

*<https://openjurist.org/5/us/137>*





## BIODATA PENULIS



**Josef Mario Monteiro, S.H., S.I.P., M.H.** adalah ASN PNS (NIP: 19750520 2006 001), dan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang NTT, dengan kepangkatan Pembina Utama Muda/ golongan ruang IVc (Lektor Kepala). Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, dan Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Terbuka.

Produktif dalam menulis buku-buku: Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945 (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014), Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016), Konsep Dasar Ilmu Hukum (Setara Press, Malang, 2017), Hukum Keuangan Negara dan Daerah (Setara Press, Malang, 2019), Pendikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Intelelegensia Media, Malang, Cetakan ke-2, 2017), dan Pendidikan

Pancasila di Perguruan Tinggi (Intelegensia Media, Malang, Cetakan ke-2, 2018), Hukum Administrasi dan Tata Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) (Deepublish, Yogyakarta, 2022), Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Setara Press, Malang, 2023), Hukum dan Kebijakan Publik (Setara Press, Malang, 2024), Metode Penelitian Hukum (Tim Penulis) (Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023), Hukum Pemilihan Umum Indonesia (Tim Penulis) (Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023), Hukum Tata Negara (Tim Penulis) (Sada Kurnia Pustaka, Padang, 2023), dan Filsafat Hukum (Tim Penulis) (GPress, Padang, 2023).

Artikel ilmiah yang ditulis dan telah diterbitkan oleh beberapa jurnal ilmiah hukum nasional terakreditasi yakni: Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, 2012; Implikasi Pembatasan Yuridis Pembubaran Partai Politik Terhadap Prinsip Demokrasi, 2010), Prioris Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta (Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 2018; Perpaduan Presidensial dan Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan RI, 2016), Pro Justitia Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (Konvensi Tentang Hak-Hak Dalam Konflik Hukum Anak, 2010; Ketidakpastian Pembubaran Partai Politik, 2010; Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, 2007; Izin Pemanfaatan Hutan Negara Untuk Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah, 2006), Dinamika Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (*Local Wisdom Functionalization For Regional Law Enforcement In Fisheries Management*, 2017), Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali (Tanggung Jawab Presiden Atas Kebijakan Menteri Yang Menimbulkan

Korupsi Berdasarkan Sistem Presidensial Dan Teori Kewenangan, 2017), Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, (Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Melalui Model Co-Management, 2021), dan Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, Yogyakarta (*Amendment of the Corruption Eradication Commision Act and its Impact on the Constitution*, 2021), dan Journal of Progressive Law and Legal Studies (JPLLS), 2023 (Presidential Threshold and Parliamentary Threshold Setting in Elections).